

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA NO.
11 TAHUN 2012 DI BANDAR LAMPUNG TENTANG KEBIJAKAN
USAHA MINIMARKET
(Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk di Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

HESTI PANGESTI

1521030218

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA NO.
11 TAHUN 2012 DI BANDAR LAMPUNG TENTANG KEBIJAKAN
USAHA MINIMARKET
(Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk di Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

HESTI PANGESTI

1521030218

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Semakin majunya perekonomian suatu Negara, maka akan dibarengi juga dengan bertambahnya perilaku konsumtif masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat dengan mulai berkembangnya minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang dapat kita temukan hampir di setiap jalan-jalan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Namun, disamping mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, berkembangnya minimarket ini pun memberi dampak yang cukup besar bagi para pemilik warung yang sudah lama berada di sekitar tempat berdirinya minimarket. Salah satunya yaitu berkurangnya pelanggan dikarenakan mereka lebih memilih berbelanja di minimarket, dimana selain barang yang mereka butuhkan lebih lengkap, dan juga seringkali minimarket mengadakan diskon-diskon yang membuat mereka tergiur, sehingga mereka lebih tertarik pergi ke minimarket. Upaya pun dilakukan Pemerintah dengan maksud untuk mengatur dan menata usaha yang ada pada suatu wilayah sebagai langkah untuk melindungi pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip keadilan dan persaingan sehat yaitu dengan melakukan penataan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket dilaksanakan dengan baik? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pemberian izin terhadap usaha minimarket?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap para pedagang yang merasakan dampak dari banyaknya supermarket. Observasi dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung dampak dari supermarket di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket belum terlaksana dengan baik di Kelurahan Tanjung Senang, dikarenakan ada pelanggaran mengenai peraturan jarak antar minimarket dengan minimarket, dan minimarket dengan pedagang eceran yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, serta dampak yang ditimbulkan dari pendirian minimarket yaitu beralihnya pembeli ke minimarket dan berkurangnya pendapatan pedagang eceran. Pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pemberian izin terhadap usaha minimarket menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak yaitu pedagang eceran. Berhubungan dengan salah satu pihak ada yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Pangesti
NPM : 1521030218
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA NO.11 TAHUN 2012 DI BANDAR LAMPUNG TENTANG KEBIJAKAN USAHA MINIMARKET (Studi pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 Desember 2019

Penulis,

Hesti Pangesti
1521030218

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

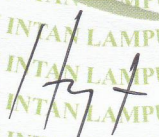
Nama : **Hesti Pangesti**
NPM : **1521030218**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap PERWALI No.11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Haryanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002


Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah,


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarama I Telp. (0721) 70353178042 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap PERWALI No.11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)"**. Disusun oleh Hesti Pangesti, NPM. 1521030218, Jurusan Muamalah, Telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Rabu, 11 Desember 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji Utama : Drs. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. M. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

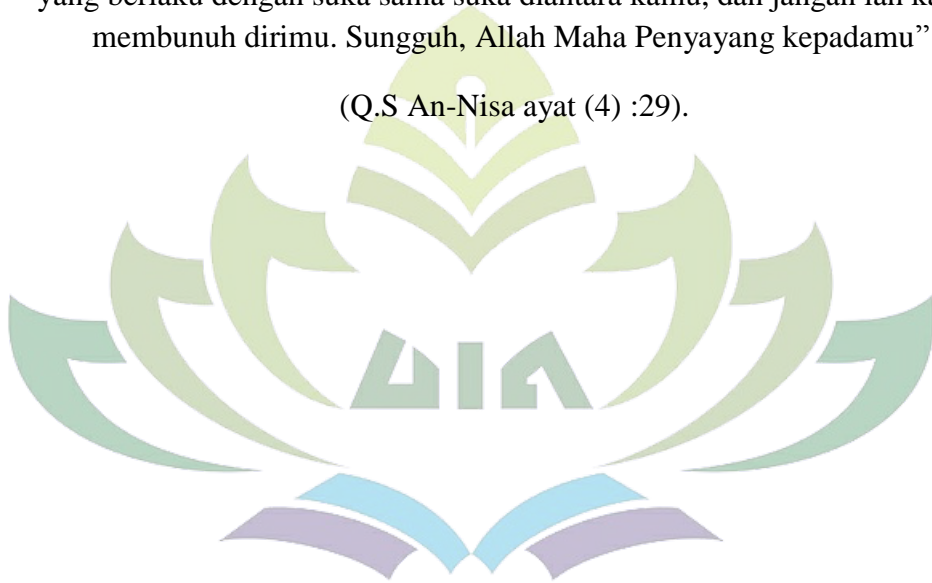
MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa ayat (4) :29).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, telah menuntunku, dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Suwarno dan Ibu Hasanah, yang selalu mendoakanku, menyayangiku, membimbingku, serta yang telah bekerja keras demi membiayaiiku hingga duduk di bangku kuliah. Kuucapkan terimakasih atas semua pengorbanan dan cinta kasih kalian untukku, yang tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
2. Kakak ku tersayang Indah Laras Sati dan Adik ku tersayang Galuh Tri Ayuni, yang senantiasa selalu memberikan pertanyaan tentang kapan wisuda dan yang selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kuucapkan terimakasih.
3. Seluruh keluarga besar Solihin yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hesti Pangesti lahir di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 21 September 1997. Terlahir dari pasangan Suwarno dan Hasanah. Anak ke-II (Dua) dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Senang pada Tahun 2004-2009, kemudian melanjutkan ke SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015 dengan mengambil jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), kemudian setelah lulus dari pendidikan SMA penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015.

Bandar Lampung, 5 November 2019

Penulis,

Hesti Pangesti
NPM. 1521030218

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur ku panjatkan segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap PERWALI Nomor 11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)**” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah SAW para keluarga-Nya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan, namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag, selaku rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Khoirudin M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Haryanto H., M.H selaku pembimbing Akademik I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan data dan referensi.
7. Teman-teman keluarga besar Muamalah G angkatan 2015 dan teman tersayangku Hasna Qonita Pramadanty, Nilan Febriana, Yus Neli, Utari Nur Permadi, semuanya yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terimakasih selalu membantuku, mengingatkanku, memberiku motivasi dan doa dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
8. Teman-teman KKN Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Juwita Sari, Khofiyatun Nur Putri, Nuraini Tri Fadillah, Marlana Anggraini, Lisma Yunita, Yani Murti Ningsih, Epi Apriyani, Fathur Rahmah, A. Chandra Dwi Hasta, M. Fahrizal Maulana, dan M. Ahfa Faidhoni, terimakasih karena telah memberikan cerita luar biasa pada saat kkn, dimana ada canda tawa, amarah, dan kesulitan-

kesulitan yang kita rasakan bersama selama kurang lebih 30 hari, yang pastinya tidak akan pernah penulis lupakan.

9. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi bagi para pembacanya. Amiin.

Bandar Lampung, 5 November 2019

Penulis,

Hesti Pangesti
NPM. 1521030218



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah	16
1. Pengertian Peraturan Daerah	16
2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah	20
3. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah	24
B. Peraturan Walikota	26
1. Pengertian Peraturan Walikota	26
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Walikota.....	27
3. Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Usaha Minimarket.....	29

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	32
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	32
2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah	33
3. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Kecil dan Menengah ...	36
B. Dasar Hukum Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Minimarket	59
C. Masalah Mursalah	62
1. Pengertian Masalah Mursalah	62
2. Dasar Hukum	63
3. Objek Masalah Mursalah	64
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Tanjung Senang	65
B. Geografis dan Demografis Kelurahan Tanjung Senang	67
C. UMKM Kelurahan Tanjung Senang	71
D. Minimarket Kelurahan Tanjung Senang	79
 BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket	82
B. Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Mengenai Usaha Minimarket	85
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket	88
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahfahaman dan lebih memfokuskan dari pembahasan yang dimaksud dengan menghindari penafsiran makna yang berbeda, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN USAHA MINIMARKET”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu di tegaskan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

Analisis Hukum Islam yaitu penguraian suatu pokok dan penelaahan bagian itu sendiri, yang di pahami dan di gali dari sumber-sumber (Alquran dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad lainnya).¹

2. Perwali No.11 Tahun 2012

Perwali atau Peraturan Walikota adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota, peraturan perizinan pendirian minimarket yang dibuat oleh Pemerintah di Kota Bandar Lampung sebagai

¹G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h. 36.

suatu tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam tujuan memajukan bidang perdagangan dan jasa.

3. Kebijakan Usaha Minimarket

Kebijakan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.² Suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk penataan dan pendirian minimarket.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Obyektif

Di Bandar Lampung Bisnis minimarket ini berkembang pesat sampai ke pelosok kota dan kecamatan, yang mengakibatkan tergesurnya pendapatan para pedagang kecil disekitarnya.

Pada satu sisi peran Pemerintah sangat penting dalam hal ini demi melindungi usaha pedagang kecil. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai minimarket yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, yang mana bahwa berkembangnya bisnis pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil dan menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

²AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 17

sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika kota dapat terwujud.

Pada sisi lain dalam hukum Islam dinyatakan bahwa Pemerintah dalam memberikan keputusan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu jika pemberian izin berdampak pada kerugian yang dialami oleh pedagang-pedagang kecil maka izin tidak boleh dikeluarkan. Para pedagang kecil ini menempati jumlah mayoritas.

Maka dari sini penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan mengenai usaha minimarket dan bagaimana analisis hukumnya dalam Islam serta dampak yang ditimbulkan dari hadirnya minimarket bagi usaha eceran dan grosir.

2. Secara Subyektif

Penelitian ini di dukung dengan literature yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan tepat waktu yang direncanakan. Selain itu judul yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan jurusan yang penulis ambil, yaitu Mu'amalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.

C. Latar Belakang

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya secara eceran. Department

store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Minimarket memiliki luas lantai yang paling kecil di antara jenis-jenis toko modern, yaitu kurang dari 400 m². Minimarket memberikan kelengkapan dan kesediaan produk yang dijual, kualitas yang dijual, kesan terdapat produk-produk import, kesan terdapatnya produk-produk yang baru dipromosikan, potongan harga (*discon*) yang diberikan, terdapatnya paket-paket khusus dengan harga untuk memudahkan dalam mencari produk sehingga membuat para konsumen tertarik berbelanja ke minimarket.

Kehadiran minimarket di Indonesia mengalami perkembangan yang terbilang pesat. Di kota-kota besar minimarket saling berjejer, satu sama lain berjarak tak begitu jauh. Perkembangan minimarket ini pada awalnya hanya ditemui di jalan-jalan utama kota Bandar Lampung. Namun kini minimarket bahkan sudah merambah ke perumahan atau pemukiman penduduk bahkan hampir ke pelosok-pelosok desa.

Di satu sisi, minimarket memang memudahkan para konsumen, minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat karena adanya pendapat bahwa minimarket lebih rapi, bersih dan praktis. Namun, di sisi lain kehadiran minimarket ini bagai mimpi buruk bagi para pedagang kecil. Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung, maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan

lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket.

Dengan keberadaan minimarket di Indonesia dikhawatirkan dapat mengancam pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah. Satu demi satu akhirnya tak mampu bersaing dan menutup tokonya. Ini tentu saja membuat sebagian kalangan khawatir mengingat minimarket dimiliki oleh para pemodal besar, beda dengan toko kelontong yang umumnya dimiliki oleh masyarakat kecil. Ada banyak jenis usaha yang dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan menengah, salah satunya adalah pedagang eceran. Pedagang eceran ini sudah lama ada dan berkembang di Indonesia, usaha ini juga banyak dijumpai baik dari daerah perkotaan hingga pedesaan dan umumnya terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk agar memudahkan masyarakat untuk membeli. Pedagang eceran bisa menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari kebutuhan pokok, makanan kemasan, peralatan mandi hingga obat-obatan.

Upaya pun dilakukan Pemerintah dengan maksud untuk mengatur dan menata usaha yang ada pada suatu wilayah sebagai langkah untuk melindungi pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip keadilan dan persaingan sehat yaitu dengan melakukan penataan. Selain itu juga penataan ini memiliki tujuan untuk membangun kemitraan antara pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mensinergikan usaha ekonomi pasar rakyat dengan toko modern.

Terkait dengan upaya mengatur dan menata usaha pada suatu wilayah, Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.³

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki penduduk sekitar 1.251.642 jiwa dengan mata pencaharian paling besar berada di sektor perdagangan.⁴ Oleh karenanya kota Bandar Lampung diarahkan untuk menjadi kota perdagangan. Untuk mewujudkan kota Bandar Lampung agar menjadi kota perdagangan maka perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Untuk itu kota Bandar Lampung memerlukan infrastruktur yang lebih baik, infrastruktur ini mencakup ruang-ruang aktifitas bagi masyarakat seperti ruang perdagangan yang baik.

Pemerintah Bandar Lampung bersama Badan Penanaman Modal (BPMP) kota Bandar Lampung telah menyusun prosedur atau pedoman pendirian minimarket, salah satunya adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor

³Pasal 4 ayat (1) Perpres 112 tahun 2007

⁴www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 6 Februari 2019 Pukul 21.12.

11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket pada pasal (2) huruf h yaitu pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dengan jarak antar lokasi minimal 500 (lima ratus) meter, dan huruf i yaitu usaha minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.⁵

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat perizinan pendirian minimarket sebagai rangkaian kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Untuk itu salah satu programnya adalah mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak kehadiran minimarket bagi pedagang eceran di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.

2. Batasan Penelitian

Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap PERWALI No.11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Usaha Minimarket”.

⁵Sudarno Eddi. Perwali No. 17 Tahun 2009 “*Tentang Penataan Minimarket*”. Berita Daerah Kota Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 22.08.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kelurahan Tanjung Senang dilaksanakan dengan baik, dan apakah dampak Kebijakan Pemerintah tersebut terhadap pedagang eceran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai persyaratan dan penataan minimarket?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Persyaratan dan Penataan Minimarket dilaksanakan dengan baik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pemberian izin terhadap usaha minimarket.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya Khazanah keilmuan Ilmu Pemerintahan dan menambah wawasan bagi penulis

dan para pembaca pada umumnya mengenai Kebijakan Pemerintah Bandar Lampung tentang persyaratan dan penataan minimarket sesuai dengan Hukum Islam.

- b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada instansi pemerintah dalam hal membuat kebijakan yaitu Walikota dan Implementer yang terkait.
- c. Pedagang kecil, penelitian ini diharapkan dapat membantu pedagang kecil dalam menemukan titik tengah terkait masalah ketimpangan pendapatan antara minimarket dan pedagang kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan titik tengah bagi para pedagang kecil di Kelurahan Tanjung Senang terkait masalah ketimpangan pendapatan dengan minimarket.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan

penelitian adalah penelitian yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta.⁶

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Arti sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang sudah daitur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁸

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan, yaitu pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung untuk mencari data tentang bagaimana dampak dari hadirnya minimarket bagi pedagang eceran dan grosir di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta, dan menilai secara objektif data yang di kaji kemudian menganalisis data tersebut dalam Hukum Islam. Deskriptif

⁶Cholid Norobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1997), h.1.

⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.7.

⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research social*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 15.

yang di maksud yaitu untuk mendapatkan sarana-sarana mengenai sesuatu yang di lakukan dalam mengatasi masalah tertentu.

3. Data dan Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekinder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Data primer ini diperoleh langsung dari para pedagang grosir dan eceran di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari referensi, buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu keseluruhan objek penelitian mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.⁹

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yaitu para pedagang eceran dan grosir yang merasakan dampak dari hadirnya minimarket.

b. Sampel

Sampel yaitu contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.¹⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian.

Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa jika populasi tersebut kurang dari 100 orang maka sampel yang digunakan adalah sebanyak populasi yang ada. Karena populasi yang ada kurang dari 100 maka diambil semua dan dijadikan sampel penelitian, maka sampel penelitian ini berjumlah 10 orang. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas, observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 199.

¹⁰*Ibid*, h. 198.

secara langsung maupun tidak langsung.¹¹ Observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung dampak dari hadirnya minimarket bagi pedagang eceran dan grosir di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen atau rapat, catatan harian, surat kabar dan sebagainya.¹²

c. Interview

Metode interview yaitu bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guied (panduan wawancara).¹⁴ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat Kelurahan Tanjung Senang yang berprofesi sebagai pedagang eceran dan grosir.

6. Teknik Pengolahan Data

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h.36.

¹²Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Andi Ovvset: 2003), h.32.

¹³Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian* (Jakarta: Buana Printing, 2009, cet. Ke 2), h.231.

¹⁴*Ibid*, h. 187.

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁵

7. Analisis Data

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁶ Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan mengurangi dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan terjadi

¹⁵*Ibid*, h. 17.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.125.

dalam hal ini adalah fakta tentang dampak hadirnya minimarket bagi para pedagang eceran dan grosir di Kelurahan Tanjung Senang.

- b. Deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Berkaitan dengan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik data-data dari lapangan tentang konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi yang dibuat untuk mengatur atau menata sesuatu dengan aturan.¹

Sedangkan secara umum pengertian peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / organisasi tertentu yang jika dilanggar akan dikenakan hukuman / sanksi. Karena jika tidak ada peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit untuk diatur.²

S. F. Masbun (2006) memberikan pengertian bahwa Peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).³

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:2001), h. 59.

²<https://bayuarsadinata-wordpress-com.cdn.ampproject.org>. *Peraturan adalah?*, diakses pada 16 Juli 2015.

³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.94.

Selanjutnya Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :⁴ Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi Peraturan Daerah secara sederhana adalah peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah di definisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁵

Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislative sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut

⁴Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁶Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia...*, h.37.

Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.⁷

a. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- 1) Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁷Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁸

c. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintahan;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁸Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Jakarta: 2011), h.8.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.⁹

2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan mejadi mitra dari Pemerintah Daerah. Sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD antara lain: ¹⁰

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

⁹*Ibid.*, h.9.

¹⁰Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum U11, 2001), h.70

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjadikan DPRD tidak berfungsi sebagai badan

legislative. Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam rangka melemahkan kedudukan DPRD adalah melalui mekanisme control terhadap lembaga tersebut. Kontrol dapat dilakukan melalui dua acara yang sangat efektif¹¹. Pertama, dialukan mealui mekanisme internal di dalam lembaga DPRD. Di daerah ada mekanisme yang tidak tertulis, tetapi sangat mewarnai interaksi antara DPRD dengan Kepala Daerah, yaitu mekanisme setengah kamar ataupun dengan satu kamar. Kedua, *Recalling*, jalan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk anggota DPRD yang kritis adalah dengan menyingkirkannya dari kelembagaan tersebut, yang sangat populer dikenal sebagai *recalling*.

Sehubungan dengan itu ada perbedaan yang mendasar apa yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 22 Tahun 1999, khususnya yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD dalam membentuk Perda UU No.22 Tahun 1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut¹²:

- a. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

¹¹Syaukani, Affan Gaffar dan M. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan PUSKAP, 2002), h.244.

¹²*Ibid*, h.245.

- d. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak enam juta rupiah;
- e. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
- f. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
- g. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:

- a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

- e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda;
- f. Perda dapat memuat keuntungan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda¹³;
- h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah;
- i. Perda dapat menunjukan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- j. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

3. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaarding*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idea der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idea der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idea der zedelijkheid*).¹⁴

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menerangkan, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

¹³Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah...*, h.72.

¹⁴Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h.113.

Untuk membuat suatu perda, sudah seharusnya memerhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan perda.¹⁵ Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.¹⁶

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu:¹⁷

- a. Landasan yuridis segi formal, landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- b. Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- c. Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

¹⁵Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia...*, h.54.

¹⁶Pipin Syahrifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.25.

¹⁷*Ibid.*

Selanjutnya, landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

B. Peraturan Walikota

1. Pengertian Peraturan Walikota

Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, mengartikan bahwa peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan¹⁹.

Walikota merupakan kepala pemerintahan kota yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan undang-undang lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kota, Walikota bersama DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD kota.

¹⁸*Ibid*, h.26.

¹⁹<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-peraturan-menurut-beberapa-ahli.html?m=1>.diakses pada 10 September 2019.

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Di era otonomi, Walikota memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan strategis. Realitas yang terjadi saat ini, tidak jarang kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*vertical*) atau peraturan perundang-undangan yang sama (*horizontal*). Oleh karenanya, Kepala Daerah (walikota) dan DPRD kota dalam membentuk peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Walikota

Dalam pembentukan Peraturan Walikota selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

a. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

d. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

f. Kejelasan urusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

g. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰

3. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Usaha Minimarket

Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung pengertian minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan. Masyarakat dengan gaya hidup modern kini lebih menyukai pasar dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan strategi.

²⁰Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM..., h.16-17.

Di minimarket para pengunjung tidak perlu tawar menawar harga dengan pedagang, tidak perlu cemas dengan adanya manipulasi timbangan, dan tidak perlu cemas akan kualitas barang.²¹ Pertumbuhan minimarket saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya di kota-kota besar, akan tetapi minimarket bahkan sudah menjalar hingga pelosok-pelosok desa. Dewasa ini pembangunan minimarket banyak yang berdiri dengan jarak kurang dari 250 meter dari Pasar Tradisional dan warung tradisional, minimarket tersebut antara lain adalah seperti, Indomaret, alfamart, chamart dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dan semakin bertambahnya jumlah minimarket dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 menjadi Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011. Terdapat tiga point perubahan dalam peraturan tersebut, yaitu pertama, perubahan jarak dari pendirian minimarket dengan persimpangan jalan. Kedua, jarak jarak antara lokasi pendirian minimarket, serta jarak antara minimarket dengan pasar tradisional.

Pada awal tahun 2012 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Walikota

²¹Herman Manolo, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: Islamic College, 2011), h.57.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, isi revisi tersebut pada point 6 pasal 3 tentang menambahkan jam buka 24 jam setelah mendapatkan persetujuan Walikota dengan syarat yang tertuang pada poin 5 pasal 3 yaitu pelayanan selama 24 jam hanya diberikan pada lokasi-lokasi yang berada dekat dengan tempat sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal antar kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, jalan nasional atau jalan provinsi.²²

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Pertama persyaratan lokasi yang tertuang dalam pasal 2. Pada Pasal 2 Pembangunan Minimarket harus memenuhi ketentuan yaitu lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Kota (RDTRK) Bandar Lampung. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern. Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi). Minimarket hanya dapat didirikan pada radius 50 (lima puluh)

²²Dokumen Peraturan Walikota tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. *Revisi Peraturan Walikota Bandar Lampung*. Di catat pada tanggal 31 Oktober 2019.

meter dari tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 (dua ratus) meter dengan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter. Dan usaha minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.²³

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian UKM kecil-menengah pada setiap Negara berbeda, tergantung dari kekuatan ekonomi di wilayah tertentu, atau Negara dari organisasi tertentu yang memberikan definisi kepada UKM kecil-menengah. Definisi pada Negara bagian Eropa pasti akan berbeda dengan definisi UKM pada Negara Indonesia.

Usaha kecil (mikro) adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut, dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari lima puluh orang.²⁴

²³Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung*. Dicatat pada tanggal 4 Oktober 2019.

²⁴Made Dharmawati, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.263.

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I pasal I menyebutkan bahwa:²⁵

- a. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Batasan sebutan usaha disebut usaha kecil berubah dari waktu ke waktu, ada pun dasar untuk dapat disebut usaha kecil saat ini adalah:²⁶

²⁵Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.155.

²⁶Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuntoro Priyambodo, *Kewirausahaan Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-ilmu Eksakta*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h.277

- a. Usaha perdagangan atau jasa, bila modal maksimumnya 80 juta rupiah.
- b. Usaha produksi, industry, dan jasa konstruksi, bila modal maksimumnya 200 juta rupiah.

Berdasarkan nilai modalnya, UKM dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. UKM mikro (bermodal kurang dari 50 juta),
- b. UKM kecil (modalnya antara 50 hingga 500 juta), dan
- c. UKM menengah (bermodal lebih dari 500 juta hingga 5 miliar rupiah).

Selain itu masih terdapat ciri-ciri lain, sehingga usaha itu dapat dikelompokkan sebagai usaha kecil. Ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum.
- b. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok.
- c. Usaha ini dimiliki dan dikelola oleh 1 orang.
- d. Usaha tidak memiliki karyawan.
- e. Modal yang digunakan diperoleh dari tabungan pribadi.
- f. Wilayah pemasaran bersifat lokal, sehingga tidak jauh dari pusat usahanya.

Kriteria UKM secara umum ada banyak dengan kriteria yang berbeda, diantaranya adalah:²⁷

- a. Manajemen bisnis sendiri

²⁷Akifa P. Nayla, *Komplet Untuk Ukm dan Waralaba*, (Yogyakarta: Laksana, 2014), h.17-20.

Pemilik UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri terkait dengan kemauan usahanya.

b. Modal usaha terbatas

Modalnya hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM tersebut.

c. Karyawan kebanyakan dari penduduk local

Pemilik UKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mandiri di daerah tersebut. Adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar.

d. Bersifat usaha keluarga

Usaha dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarga.

e. Posisi kunci dipegang oleh pemilik

Maju mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha.

f. Modal usaha berasal dari keuangan keluarga

Modal pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah.

g. Menuntut motivasi tinggi

Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi.

h. Menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksi

Teknologi sederhana yang dimaksud adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih.

3. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Kecil dan Menengah

Sebagaimana pada umumnya UKM tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.²⁸

a. Kelebihan UKM

- 1) Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak,
- 2) Meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerah tempat berdirinya UKM,
- 3) Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia.

b. Kekurangan UKM

- 1) Sistem produksi dan pemasaran relative lemah,
- 2) Sulit mendapatkan modal jangka panjang,
- 3) Pemilik tidak mampu mengelola usaha dan sumber daya manusia.

4. Pengertian Pedagang Eceran

Kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran adalah sangat penting dalam proses penyaluran barang dan jasa. Tanpa usaha perdagangan besar dan eceran, sulit produsen menyalurkan barang kepada konsumen atau ke pengecer, tapi kegiatan tersebut tidak dapat diandalkan dan tidak efisien.

²⁸*Ibid*, h.38.

Apa yang diartikan dengan perdagangan eceran atau *retailing* adalah; *Retailing may be defined as the activities incident to selling goods and services to ultimate consumers. Retailing is the final link in the chain of distribution of most products from initial producers to ultimate consumers.*

Artinya: Perdagangan eceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.²⁹

Berikut ini beberapa pengertian pedagang eceran penjualan eceran atau ritel dari beberapa sumber buku:

- a. Menurut Tjiptono, Pedagang eceran (*retailing*) merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis.³⁰
- b. Menurut Hendri Ma'ruf, ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Sedangkan pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen, ritel perorang atau peritel kecil memiliki jumlah gerai bervariasi, mulai dari satu gerai hingga lebih.

²⁹Prof. Dr. H. Buchari Alma, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.146.

³⁰Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), h.191.

- c. Menurut Kotler, usaha eceran (*retailing*) adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.

5. Jenis-Jenis Pedagang Eceran

Secara garis besar di Indonesia, ritel terbagi menjadi dua jenis, yaitu ritel tradisional dan ritel modern. Ritel modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun ritel jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*).

Pedagang eceran yang memiliki toko atau disebut pengecer toko (*Store Retailers*), dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:³¹

a. Toko Barang Khusus (*Specially Store*)

Lini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam. Toko pakaian adalah toko lini tunggal; toko pakaian pria adalah toko lini terbatas; dan toko kemeja pesanan pria adalah toko yang sangat khusus.

b. Toko Serba Ada (*Departement Store*)

Beberapa lini produk, biasanya pakaian, perlengkapan rumah dan barang kebutuhan keluarga dengan masing-masing lini yang ditempatkan sebagai bagian tersendiri yang dikelola pembeli khusus atau pedagang khusus.

³¹Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2003), h.216.

c. Pasar Swalayan (*Supermarket*)

Usaha yang relative besar, berbiaya rendah, bermargin rendah, bervolume tinggi, swalayan yang dirancang untuk melayani semua kebutuhan untuk makanan, sarana mencuci, dan produk-produk keluarga.

d. Toko Kenyamanan (*Convenience Store*)

Toko yang relative kecil dan terletak dekat daerah pemukiman, menjual lini terbatas produk-produk kenyamanan dengan tingkat perputaran yang tinggi dan harga yang sedikit lebih tinggi.

e. Toko Diskon (*Discount Store*)

Barang dagangan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah, dengan margin yang lebih rendah dari volume yang lebih tinggi.

f. Pengecer Potongan Harga (*Off-Price Retailer*).

Barang dagangan yang dibeli di bawah harga pedagang besar biasa dan dijual di bawah harga eceran.

g. Gerai Pabrik (*Factory Outlet*)

Dimiliki dan dijalankan produsen dan biasanya menjual barang-barang yang berlebihan, tidak diproduksi lagi, atau tidak biasa.

h. Pengecer potongan harga independen (*Independent off-price retailer*)

Dimiliki dan dijalankan pengusaha atau divisi perusahaan eceran yang lebih besar.

i. Klub gudang atau klub pedagang besar (*warehouse clubs atau wholesale clubs*)

Menjual pilihan terbatas jenis produk kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, pakaian bermerek dan berbagai jenis barang lain dengan diskon yang sangat besar bagi anggota-anggota yang membayar iuran keanggotaan tahunan.

j. Toko Besar (*Superstore*)

Ruang penjualan sekitar 35.000 kaki persegi yang ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumen untuk jenis produk makanan dan non-makanan yang dibeli rutin.

k. Toko Kombinasi (*Combination Stores*)

Toko gabungan makanan dan obat yang memiliki ruang penjualan rata-rata 55.000 kaki persegi.

l. Hiperpasar (*Hypermarkets*)

Berkisar antara 80.000 hingga 220.000 kaki persegi dan menggabungkan pasar swalayan, toko diskon, dan eceran gudang.

m. Ruang Pameran Katalog

Pilihan yang sangat banyak barang-barang berharga tinggi, mengalami perputaran cepat, dan bermerek dengan harga diskon.

6. Keuntungan dan Kelemahan Perdagangan Eceran

Beberapa keuntungan dari perdagangan eceran kecil adalah:³²

a. Modal yang diperlukan adalah kecil dan rentabilitasnya besar,

³²Prof. Dr. H. Buchari Ahmad, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum...*, h.152.

- b. Pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatnya dari usaha itu merupakan pendapatan tambahan atau kadang-kadang hanya iseng atau mengisi waktu luang terutama pada daerah musiman,
- c. Tempat kedudukan pedagang-pedagang eceran kecil biasanya paling strategis. Mereka selalu mendekatkan *the center of consumers* (pusat-pusat konsumen),
- d. Hubungan antara pedagang eceran kecil dan konsumen adalah kuat misalnya kita lihat pembeli-pembeli pada warung-warung kopi mengadakan obrolan yang intim sekali dengan pemiliknya.

Kelemahan yang terdapat pada perdagangan eceran kecil ini adalah:

- a. Keahlian kurang,
Administrasi dalam arti pembukuan tidak diperhatikan, sehingga kadang-kadang habis dimakan,
- b. Pedagang kecil tidak mampu mengadakan sales promotion.

Faktor-faktor yang mendorong majunya perdagangan eceran:

- c. Lokasi/tempat toko eceran

Tempat yang strategis dari toko eceran ini sangat besar pengaruhnya kepada kemajuan kelancaran penjualan barang pada toko tersebut. Pemilihan lokasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat profitabilitas dan kontinuitas usaha dalam jangka panjang. Menurut Kotler (2004: 446) dalam Bob Foster, *Retailing are accustomed to saying that the three keys to success are location,*

location and location. Jadi tiga kunci sukses bagi toko eceran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi.

d. Kelengkapan Barang

Lengkapnya barang pada toko-toko eceran akan sangat menarik bagi konsumen. Lengkap di sini diartikan barang-barangnya komplit sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan. Jika barang tidak lengkap, maka konsumen akan mencari toko lain. Pada hati konsumen akan timbul anggapan bahwa toko tidak lengkap, akhirnya konsumen pindah menjadi langganan toko lain tersebut.

e. Ketepatan Harga

Harga yang tepat sangat penting demi kemajuan toko eceran yang berada di kota besar. Toko eceran yang menetapkan harga jual yang cukup murah, atau harga pasti, harus selalu mencari informasi supaya harga yang ditetapkan oleh toko eceran tersebut, terutama untuk barang-barang yang sangat terkenal. Bahkan ada toko-toko eceran yang menetapkan harga untuk barang-barang yang dikenal umum di bawah harga pasar.

7. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Liverlihood, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima.

- b. Micro, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Sifat kewirausahaan tersebut penting supaya masyarakat tidak selamanya terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan sepanjang hidupnya.³³

Ada beberapa pengklasifikasian UMKM dari beberapa perspektif atau pendekatan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi undang-undang.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi berdasarkan asset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut:

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih/Aset (tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan/Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 Juta
Usaha Kecil	>Rp50 juta- Rp500 juta	>Rp300 juta-Rp2,5 Juta
Usaha Menengah	>Rp500 juta- Rp10 Milyar	>Rp2,5 Milyar- Rp50 Milyar

Menurut Badan Pusat Statistik.

³³<https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>, *Usaha Mikro*, diakses pada 14 September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan pada setiap unit usaha yaitu:

- a. Usaha Kecil: tenaga kerja 5-19 orang.
- b. Usaha Menengah: tenaga kerja 20-99 orang.

Menurut Perspektif Perkembangan Usaha.

Dalam perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. UMKM Sektor Informal: Seperti pedagang kaki lima;
- b. UMKM Mikro: UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya;
- c. UMKM Kecil Dinamis: UMKM yang sudah mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sukontrak) dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*: UMKM yang sudah berwirausaha dengan cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.³⁴

8. Prosedur Memulai Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk memulai suatu usaha banyak cerita yang dapat kita ambil hikmahnya. Sering kali kita kagum menyaksikan kesuksesan seorang pengusaha. Kadang-kadang kita tidak tahu proses keberhasilan pengusaha tersebut. Namun, jika kita telaah lika-liku sebelum sukses menjadi

³⁴<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>, *Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia*, diakses pada 14 September 2019.

pengusaha banyak cerita suka duka di belakang kesuksesannya. Tidak sedikit cerita yang menyedihkan di balik sukses yang diraih oleh pengusaha tersebut. Ada pengusaha yang memulai usahanya dari nol dengan tertatih-tatih. Bahkan sering kali pengusaha tersebut menderita kerugian dan nyaris bangkrut. Namun, karena keberanian, kesabaran, ketekunan, dan kepandaiannya mengelola usaha dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil.

Dari hasil penelitian di lapangan terdapat beragam cara dan sebab untuk memulai usaha, ada lima sebab atau cara seseorang untuk mulai merintis usahanya, yaitu³⁵:

a. Faktor keluarga pengusaha;

Pengusaha yang memulai usaha karena faktor keluarga cukup banyak ditemui. Artinya, seseorang memulai usaha karena keluarga mereka sudah memiliki usaha sebelumnya. Orang tua atau saudara pengusaha tersebut menganjurkan keluarga lainnya untuk membuka usaha sendiri. Keluarga sengaja mengadap anggota keluarga lain untuk meneruskan usaha atau membuka cabang atau usaha baru. Dengan demikian, mulai dari modal, suplai bahan-bahan, sampai manajemen sang pengusaha pemula tinggal mengikuti yang sudah ada. Kesuksesan usaha seperti ini cukup banyak terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

³⁵Dr. Kasmir, SE., M.M, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.38.

b. Sengaja terjun menjadi pengusaha;

Sengaja terjun menjadi pengusaha, artinya seseorang dengan sengaja mendirikan usaha. Biasanya mereka belajar dari kesuksesan orang lain. Mereka mengikuti contoh dari pengusaha yang ada dengan mencari modal atau bermitra dengan orang lain. Model ini biasanya dilakukan oleh mereka yang berstatus pegawai, namun memiliki naluri bisnis. Tidak sedikit model seperti ini mencapai kesuksesan. Kesuksesan dan kegagalan orang lain menjadi tuntunan dan pedoman pengusaha ini dalam menjalankan kegiatan usahanya.

c. Kerja sampingan (iseng);

Faktor berikutnya adalah melakukan usaha dengan tidak disengaja, biasanya dilakukan secara iseng. Ini sering disebut sebagai usaha sampingan untuk tambahan kegiatan. Usaha ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mencoba menjual atau memproduksi sesuatu skala kecil untuk mengisi waktu luang. Akan tetapi, usaha ini ternyata terus meningkat. Meningkatnya pesanan atau permintaan ini terus pula direspons oleh pemilik dengan menambah modal dan kapasitas produksinya. Maka, kegiatan yang semula dilakukan hanya untuk mengisi waktu senggang menjadi kegiatan yang memberikan hasil yang luar biasa.

d. Coba-coba;

Memulai usaha dengan cara coba-coba cukup banyak dilakukan dan juga menuai kesuksesan. Usaha ini biasanya dilakukan oleh mereka

yang belum memiliki pengalaman, mereka yang kesulitan mencari pekerjaan, atau mereka yang baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, tidak sedikit usaha yang diawali dengan coba-coba ini yang mencapai kesuksesan.

e. Terpaksa.

Faktor usaha karena terpaksa memang jarang terjadi, namun berdasarkan hasil penelitian ternyata ada beberapa wirausahawan yang berhasil karena keterpaksaan. Mereka biasanya membuka usaha karena kehilangan pekerjaan atau menganggur. Kemudian memutuskan untuk berwirausaha. Langkah melakukan wirausaha dijalankan dengan setengah hati. Namun, kenyataan bahwa usahanya memberikan hasil yang lumayan dalam waktu relative singkat membuatnya bersemangat. Hal itu menjadi motivasi yang kuat untuk memajukan usahanya.³⁶

Di samping faktor minat atau bakat, faktor penentu lainnya adalah modal yang dimiliki. Setiap bidang usaha memerlukan modal yang besarnya tergantung usahanya. Faktor modal dapat dicari dari berbagai sumber, baik dari kantong pribadi, para sanak family, rekan-rekan sejawat, atau pinjaman. Namun, untuk usaha baru modal pinjaman relative lebih sulit diperoleh karena jarang lembaga keuangan yang mau membiayai usaha yang masih baru.

³⁶*Ibid*, h.39-40.

Jadi, untuk menentukan bidang usaha yang akan digeluti tergantung dari empat faktor sebagai berikut:³⁷

1) Minat atau bakat

Minat atau bakat sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri seseorang. Artinya, ketertarikan pada suatu bidang sudah tertanam dalam dirinya. Minat juga dapat tumbuh setelah dipelajari dari berbagai cara. Namun, seseorang yang memiliki minat dari dalam atau bakat dari keturunan akan lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi dalam mengembangkan usahanya.

2) Modal

Modal secara luas dapat diartikan uang. Untuk memulai usaha terlebih dulu diperlukan sejumlah uang. Dalam arti sempit modal dapat dikatakan sebagai keahlian seseorang. Dengan keahlian tertentu seseorang dapat bergabung dengan mereka yang memiliki modal uang untuk menjalankan usaha.

3) Waktu

Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati hasil dari usahanya. Setiap usaha memiliki masa yang berbeda-beda ada yang dalam jangka waktu pendek ada pula dalam jangka waktu menengah atau panjang. Dalam jangka pendek artinya di bawah satu tahun usaha tersebut sudah memberikan hasil, misalnya usaha dagang, agribisnis, usaha jasa, peternakan ikan atau ayam. Kemudian dalam jangka

³⁷*Ibid*, h.43-44.

menengah misalnya usaha jeruk cokelat atau peternakan kambing, sedangkan jangka panjang seperti pertanian karet atau kelapa sawit.

4) Laba

Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya margin laba yang diinginkan. Di samping itu, dalam hal laba yang perlu dipertimbangkan adalah jangka waktu memperoleh laba tersebut. Margin laba maksudnya jumlah laba yang akan diperoleh (dalam persentase tertentu), sedangkan jangka waktu adalah lama tidaknya memperoleh laba, sesaat atau terus-menerus.

5) Pengalaman

Pengalaman maksudnya pengalaman pribadi pengusaha tersebut atau pengalaman orang lain yang telah berhasil dalam melakukan usaha. Pengalaman ini merupakan kesalahan dalam menjalankan usahanya nanti.

9. Perizinan

Dalam mendirikan usaha diperlukan perizinan, meskipun usaha yang dijalankan tergolong kecil, aspek tersebut juga sangat perlu diperhatikan. Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.³⁸

Berikut ini definisi izin menurut beberapa ahli:

³⁸Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, (Surabaya: 1995), h.1 - 2.

- a. Utrecht memberikan pengertian *vergunning* (izin) sebagai berikut:
bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya saja asal diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³⁹
- b. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.
- c. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰
- d. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut:

³⁹E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h.187.

⁴⁰Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi...*, h.3.

⁴¹Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, (Jakarta: 1995), h.8.

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang tinggi, izin membongkar pada monument-monument).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

10. Izin Mendirikan Usaha

Sebelum usaha benar-benar dimulai, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Pemerintah, setahap demi setahap telah memberlakukan perizinan bagi usaha kecil, yaitu usaha kecil industry atau perdagangan yang telah memiliki tempat yang tetap. Ini berarti usaha kecil yang tempatnya berpindah-pindah (misalnya pedagang keliling, juga usaha penggilingan padi keliling) belum diwajibkan memiliki perizinan. Izin itu dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas usaha. Ada pun izin-izin yang harus dimiliki ada beberapa macam dan itu bergantung pada jenis usahanya. Ada pun bidang-bidang usaha yang memerlukan izin tersebut sebagai berikut:

- a. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementrian Perdagangan.

- b. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan Surat Izin Usaha Kepariwisata dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- d. Usaha di bidang industry memerlukan Surat Izin Usaha Perindustrian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Secara umum, untuk usaha industri dan perdagangan diperlukan 7 perizinan berikut ini:⁴²

- a. Izin Prinsip, merupakan persetujuan yang dikeluarkan Pemda setempat untuk mendirikan perusahaan industry. Izin ini disebut juga persetujuan prinsip mendirikan perusahaan industry.
- b. Izin penggunaan tanah, merupakan izin yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemda setempat setelah izin pembebasan tanah dimiliki. Izin pembebasan tanah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan.
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ini dikeluarkan oleh Pemda melalui Dinas Pengawasan Pembangunan Kota. Persyaratannya, bangunan yang didirikan sesuai gambar dan sudah disahkan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu tempat sekitarnya.
- d. Izin Gangguan, izin ini wajib dimiliki perusahaan. Izin gangguan setempat. Sebelum mengajukan permohonan izin, perusahaan wajib memiliki izin dari RT, RW, desa, serta, serta persetujuan tidak

⁴²Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses...*, h.294-296.

berkeberatan dari tetangga terdekat. Izin ini wajib diperbarui setiap 3 tahun sekali bila usahanya masih dilanjutkan. Terdapat 4 persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk mengurus izin.


- 1) Tempat usaha dan pekarangan harus selalul bersih.
- 2) Hanya buka pada jam tertentu dan tidak mengganggu sekitarnya.
- 3) Menyediakan sarana pengamanan seperti pemadam kebakaran dan obat-obatan
- 4) Diesel tidak berisik dan fondasi dibikin kuat menahan getaran.

e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin ini dikeluarkan oleh Departemen/Dinas Perdagangan dan Koperasi melalui Kanwil Perdagangan Daerah, dan harus diperbarui 5 tahun sekali. Jika disetujui untuk melakukan usaha, maka pengusaha itu memiliki 3 surat, yaitu SK Menteri tentang pemberian SIUP, SIUP, dan Surat Keterangan Identitas Pemilik SIUP. SIUP perusahaan kecil dan menengah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama menteri, sedangkan SIUP untuk perusahaan besar ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri. Formulir SIUP untuk perusahaan dibedakan warnanya, yaitu warna putih untuk perusahaan kecil, warna biru untuk perusahaan menengah, dan warna kuning untuk perusahaan besar.

Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai berikut:

- 1) Salinan kata pendirian usaha dari notaris.

- 2) Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman.
 - 3) Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat.
 - 4) Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas.
 - 5) Salinan SITU dari pemerintah daerah.
 - 6) Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab perusahaan.
 - 7) Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala daerah tingkat II.
 - 8) Pas foto 2 (dua) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab perusahaan.
 - 9) Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan komisaris mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor surat izin usaha perdagangan dari perusahaan setempat.
- f. Wajib Daftar Perusahaan, dikeluarkan oleh Departemen /Dinas perdagangan melalui Kanwil Perdagangan setempat. Pendaftaran ini paling lambat dilakukan 3 bulan setelah mulai menjalankan usaha, bila usaha masih akan diteruskan maka wajib didaftarkan kembali setiap 5 tahun.
- g. Izin-izin Departemen, dikeluarkan oleh setiap departemen yang membawahi bidang usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, usaha pengolahan hasil pertanian wajib mendaftarkan ke Departemen



Pertanian, sedangkan Departemen Kesehatan untuk usaha yang menyangkut makanan atau minuman dan obat-obatan. Departemen Perindustrian untuk usaha industry dan produksi, sedangkan Departemen Pariwisata untuk biro-biro jasa perjalanan. Izin-izin itu diajukan melalui Kanwil atau kantor dinasnya.

11. Perdagangan dalam Islam

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.⁴³

Perdagangan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang diartikan diatas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Secara

⁴³*Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 6 Volume 1. Tanggal 15 2010.

etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar.

Sebagaiman firman Allah SWT :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)⁴⁴

Artinya: "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, dana tau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Rasulullah adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan, Rasulullah SAW. Berpegang pada lima konsep yaitu :

- a. Jujur
- b. Ikhlas
- c. Profesionalisme
- d. Silaturahmi
- e. Murah hati

Dalam perspektif ekonomi Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran, serta melarang umatnya dalam usaha yang menimbulkan mudharat bagi orang lain. Islam mengharamkan mereka yang menimbunnya dengan siksa yang perih di hari kiamat. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar,

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.36.

yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Seperti dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu." (Q.S An-Nisa ayat (4): 29).

Dalam Islam ada beberapa macam perdagangan atau jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut⁴⁶:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م لَا يَبِيعُ حَاضِرِيْنَا دِ (رواه البخارى ومسلم)

⁴⁵Ibid, h.65.

⁴⁶Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), h.82.

Artinya: “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang kota) barang orang dusun (baru datang).” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang oleh orang lain, seperti seorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang memberi dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوِّمِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- c. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah SAW bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنِ النَّجَشِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.” Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري)

رى ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak menjual atas penjualan orang lain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam perdagangan, Islam juga mengatur mengenai pembagian lapak agar diperoleh keharmonisan dalam sistem perdagangan. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral yakni perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Mengenai pembagian lapak Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab berpendapat bahwa:

قَالَ الْغَزَالِيُّ الْأَسْوَاقُ الَّتِي بَنَاهَا السَّلَاطِينُ بِالْأَمْوَالِ الْحَرَامِ تَحْرُمُ التَّجَارَةُ فِيهَا
وَسُكْنَاهَا فَإِنْ سَكَنَهَا بِأُجْرَةٍ وَكَسَبَ شَيْئاً بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ كَانَ عَاصِيًا بِسُكْنَاهُ
وَلَا يَحْرُمُ كَسْبُهُ وَلِلنَّاسِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدُوا سَوْقًا أُخْرَى فَالْشِّرَاءُ مِنْهَا أَوْلَى
لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنَ الْأُولَى إِعَانَةٌ لِسُكَّانِهَا وَتَرْغِيبٌ فِي سُكْنَاهَا وَكَثْرَةُ أُجْرَتِهَا وَاللَّهُ
⁴⁷سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

Artinya: “Imam Al-Ghazali mengatakan, ‘Aktivitas penjualan dan pengambilan lapak di dalam bangunan pasar yang difasilitasi pemerintah dengan biaya yang haram, juga haram dilakukan. Kalau seseorang menempatkannya dengan biaya sewa tertentu dan ia membuka usaha dengan biaya sewa tertentu dan ia membuka usaha dengan cara syar’i, maka ia terbilang bermaksiat atas pengambilan lapaknya. Sedangkan usahanya sendiri tidak diharamkan. Masyarakat juga boleh menurut syar’i berbelanja kepadanya. Tetapi jika ada pasar alternative, masyarakat tentu lebih utama berbelanja di pasar alternative tersebut karena aktivitas

⁴⁷Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyyah), h.321.

belanja di pasar sebelumnya itu tidak lain menolong penjual yang menempati lapak, membuat nyaman penempatan lapak, dan tentu saja memperbanyak modal bagi penjual untuk biaya sewa lapak.”

D. Dasar Hukum Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha

Minimarket

Syeikh Wahbah bin Mustafa Al Zuhayli adalah seorang Ulama Fikih Kontemporer dan Ahli Tafsir ia berpendapat dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*.

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ تَرْتَبُ ضَرَرٌ أَكْثَرُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ: إِذَا اسْتَعْمَلَ الْإِنْسَانُ حَقَّهُ بِقَصْدٍ تَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ الْمَشْرُوعَةِ مِنْهُ، وَلَكِنْ تَرْتَبُ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ يُصِيبُ غَيْرَهُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْمُقْصُودَةِ مِنْهُ، أَوْ يُسَاوِيهَا، مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرَاعِ، سَوَاءً أَكَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعَ عَامًّا يُصِيبُ الْجَمَاعَةَ، أَوْ خَاصًّا بِشَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ وَالذَّلِيلُ عَلَى الْمَنْعِ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴⁸

“Kaidah ketiga adalah dampak mudharat yang lebih besar dibanding maslahatnya. Ketika seseorang menggunakan haknya dengan tujuan mewujudkan sebuah kemaslahatan yang dapat dilakukan, tetapi usahanya menimbulkan mudharat bagi orang lain yang lebih besar dibanding atau setara dengan maslahat yang direncanakan, maka harus dicegah sebagai bentuk preventif, sama saja apakah mudharat itu bersifat umum yang menimpa banyak orang atau bersifat khusus orang per orang.” Argumentasi atas larangan ini adalah sabda Rasulullah SAW, ‘Tidak mudharat dan memudharatkan.’

Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk mengembangkan lebih lanjut atas tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan berbisnis. Dalam Islam

⁴⁸Syekh Wahbah bin Mustafa Al Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV), juz 4 h.392.

dilarang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Suatu tindakan harus ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi orang banyak, agar terciptanya kehidupan manusia yang aman, sejahtera dan adil.

Serta pandangan pada kutipan fikih empat madzhab berikut ini:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ) وَالضَّرَرُ هُوَ الضَّرَرُ وَمَعْنَاهُ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَرْفَعَ ضَرَرَهُ عَنْ غَيْرِهِ. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا، أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ مَرْؤُوسِيهِ، فَلَا يُؤْذِيهِمْ هُوَ، وَلَا يُسَمِّحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ، أَنَّ تَرْكَ النَّاسِ بِدُونِ قَانُونٍ يَرْفَعُ عَنْهُمْ الْأَذَى وَالضَّرَرَ، يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَكُلُّ حُكْمٍ صَالِحٍ فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَرَفْعُ ضَرَرٍ يُقَرُّهُ الشَّرْعُ وَيَرْضَاهُ

Artinya: "Pengertian sabda Rasulullah SAW, 'tidak mudharat dan memudharatkan' adalah semestinya seorang Muslim, menghilangkan mudharat dari saudaranya. Setiap pemimpin apakah ia pemerintah atau bukan wajib melenyapkan mudharat dari para pengikut atau masyarakatnya. Ia tidak boleh menyakiti mereka. Ia tidak boleh mengizinkan siapapun untuk menyakiti mereka. (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, jus V, halaman 193).

Kehidupan perekonomian dalam masyarakat dapat berjalan dengan seimbang diperlukan campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi khususnya. Hal tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak. Tidak hanya pedagang tetapi juga msyarakat sipil yang sebagai

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid V), h.193.

konsumen. Dalam hal kemaslahatan ini, Islam mengaturnya dalam konsep kaidah fiqh, yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁵⁰

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

E. Maslahat Mursalah

1. Pengertian Maslahat Mursalah

Maslahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

⁵⁰<http://www.abdulhelim.com/2012/09/kumpulan-kaidah-fikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html>, diunduh pukul 21.24, 16 Desember 2019.

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan itu, ialah :⁵¹

- a. Tingkat pertama yaitu tingkat dhurari, tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah :
 - 1) Memelihara agama.
 - 2) Memelihara jiwa.
 - 3) Memelihara akal.
 - 4) Memelihara keturunan.
 - 5) Memelihara harta.
- b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan.
- c. Tingkat ketiga, ialah tingkat tahsini.

Alam mengistinbatkan hukum, dibedakan antara qiyas, istihsan dan maslahat mursalah. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian, yang pertama tidak ada nashnya, karena itu belum ditetapkan hukumnya, sedang yang kedua ada nashnya dan telah ditetapkan hukumnya. Pada istihsan hanya ada satu peristiwa, tetapi ada dua dalil yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Dalil yang pertama lebih kuat dari yang kedua, tetapi karena ada sesuatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua. Sedang pada maslahat mursalah hanya ada satu peristiwa dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu

⁵¹Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Dr. Sohari, M.H.,M.M. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.79.

kepentingan yang sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan hukumnya, karena itu ditetapkanlah hukum berdasar kepentingan itu.

2. Dasar Hukum

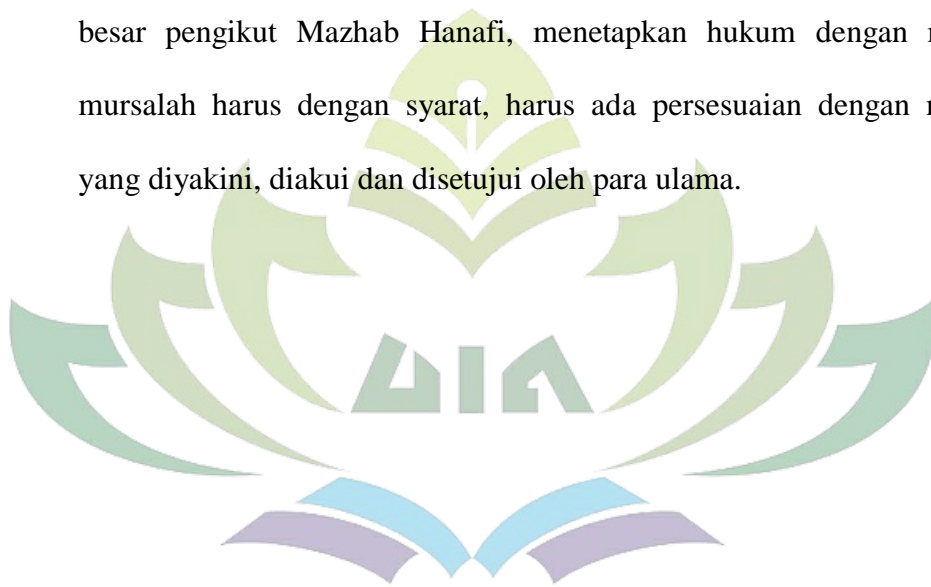
Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat mursalah, ialah :⁵²

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW., kemudian timbul dan terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

3. Objek Maslahat Mursalah

⁵²*Ibid*, h.80-81.

Yang menjadi objek maslahat mursalah, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya *Mashalihul Mursalah* menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya. Menurut Imam Al-Haramain: Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi, menetapkan hukum dengan maslahat mursalah harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan maslahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid V.

Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyyah.

Kementrian agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Syekh Wahbah bin Mustafa Al Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid IV.

Kamus

G. Nugraha Setya dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:2001.

Buku

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Basah Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Surabaya, 1995.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* Jakarta: 2011.

Dharmawati Made, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Dr. Kasmir, SE., M.M, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Dr. Sanusi Ahmad, M.A. dan Dr. Sohari, M.H., M.M, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989.

Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 6 Volume 1. Tanggal 15 Juni 2010.

Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya: 1995.

Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum U11, 2001.

Manan Bagir, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta: 1995.

Manolo Herman, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: Islamic College, 2011.

Murdaka Bambang Eka Jati dan Kuntoro Priyambodo Tri, *Kewirausahaan Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-ilmu Eksakta*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.

Norobuko Cholid dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni, 1986.

Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: Indeks, 2003.

P. Nayla Akifa, *Komplet Untuk Ukm dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksana, 2014.

Prof. Dr. H. Alma Buchari, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Ronny Kuontoro, *Metode Penelitian*, Jakarta: Buana Printing, 2009, cet. Ke 2.

Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suryana Yuyus dan Bayu Kartib, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Syahrifin Pipin dan Jubaedah Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syaukani, Gaffar Affan dan M. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan PUSKAP, 2002.

Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2008.

Utrecht. E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.

Walgito Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Andi Ovvset: 2003.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Yusuf Hamali Arif, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Undang-undang

Dokumen Peraturan Walikota tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket, *Revisi Peraturan Walikota Bandar Lampung*.

Pasal 4 ayat (1) Perpres 112 tahun 2007.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.

Sumber Online

Eddi Sudarno. Perwali No. 17 Tahun 2009 “*Tentang Penataan Minimarket*”. Berita Daerah Kota Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 22.08.

<https://bayuarsadinata-wordpress-com.cdn.ampproject.org>. *Peraturan adalah?*, diakses pada 16 Juli 2015

[http://www.lepank.com/2012/08/pengertian peraturan menurut beberapa ahli.html?m=1](http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-peraturan-menurut-beberapa-ahli.html?m=1).diakses pada 10 September 2019.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt551af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/>, diakses pada 15 September 2019.

<https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>, *Usaha Mikro*, diakses pada 14 September 2019.

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>, *Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia*, diakses pada 14 September 2019.

